



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**I N S P E K T O R A T**

Jl. Kebun Karet Tomori Telp ☎ (0927)-2321351

**L A B U H A**

**PIAGAM AUDIT INTERN**

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor public).
2. Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
3. Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
  - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
  - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
  - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
  - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
  - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direvisi dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempumaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal 02 Januari 2017

**INSPEKTUR KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**



SLAMATAK DA  
Nip. 19680825 199103 1 001

Disahkan oleh:

**BUPATI HALMAHERA SELATAN**



**BAHRAEN KASUBA S.Pd, M.Pd**

## **PENJELASAN /SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP**

### **1. PENDAHULUAN**

- 1) Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan

### **2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- 1) Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Halmahera Selatan.
- 2) Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut :
  - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
  - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP.
  - c. Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
  - d. Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Selatan.
  - e. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit APIP.

### **3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Halmahera merupakan implementasi yang harus dilakukan, yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9...Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021 bahwa visi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021 adalah **"MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN HALMAHERA SELATAN SEBAGAI KABUPATEN KEPULAUAN YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DALAM KEBERSAMAAN YANG ADIL PADA TAHUN 2021 "**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas dirumuskanlah misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas hidup baik untuk dapat bekerja secara mandiri.
2. Memantapkan Kehidupan Sosial Masyarakat yang harmonis dan religius berbasis revolusi mental.
3. Memantapkan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bebas KKN, profesional dan melayani.
4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang pembangunan daerah.
5. Membangun Ekonomi Daerah berbasis Kawasan Strategis

Ditinjau dari sisi tugas sebagai lembaga pengawas, secara umum tugas Inspektorat terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Inspektorat berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 3 yaitu :**"Memantapkan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bebas KKN, profesional dan melayani"**

Penjelasan Misi ketiga merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk terus Memantapkan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean government untuk peningkatan kualitas pelayanan publik

### **4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah kabupaten dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, yang paling kurang meliputi :

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;

- 2) Melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 5) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (value for money audit), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
- 6) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- 7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 8) Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan auditi;
- 9) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya; dan
- 11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan dibidang pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus pengaduan ;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengawasan ;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Inspektorat;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan instansi lain ;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan dalam rangka kepentingan pemerintah daerah;
- i. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan bidang pengawasan;
- j. Menyelenggarakan pengujian serta penilaian atas laporan setiap unsur dilingkungan pemerintah daerah serta pemeriksaan pengawasan fungsional atas dasar petunjuk Bupati;
- k. Melakukan pengusutan kebenaran informasi/laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi pembangunan.

1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Halmahera Selatan dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

## **6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
- e. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

## **7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan paling kurang meliputi:

- a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah sesuai ketentuan;
- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

## **8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP**

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAPI).

## **9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP**

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi :

- a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## **10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR**

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

## **11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

### **INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAN SATUAN KERJA**

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun consulting), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.

- c. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### **INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

- a. Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

#### **INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH**

- a. Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra audit pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- b. Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- d. *Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).*

#### **INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)**

1. Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:



- a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
- b) sosialisasi SPIP;
- c) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
- d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
- e) Peningkatan kompetensi auditor APIP.

2. Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

**12. PENILAIAN BERKALA**



- a. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Halmahera Selatan.

**13. PENUTUP**

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempumaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik

Ditetapkan di : Labuha  
 Pada Tanggal : 02 Januari 2017

Mengetahui,  
 Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan



**HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, MM**  
 Nip. 19650621 198603 1 001

Dibuat oleh,  
 Inspektur Kabupaten Halmahera Selatan




**SLAMET AKBAR**  
 Nip. 19680825 199103 1 001

Disahkan oleh:  
**BUPATI HALMAHERA SELATAN**

**BAHRAEN KASUBA S.Pd, M.Pd**